

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Multilayanan menjadi urgensi dalam pelaksanaan layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Dengan konsep multilayanan multifungsi, UPT dapat merespon cepat berbagai permasalahan yang ada, termasuk untuk melaksanakan respon terhadap bencana alam. Berdasarkan Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, UPT Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melaksanakan layanan langsung yang bersifat multilayanan multifungsi. Kementerian Sosial telah bertransformasi fungsi dari Sentra satu layanan menjadi multilayanan. Transformasi tersebut adalah kebijakan inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan Kementerian Sosial, sekaligus tugas multilayanan sentra bekerja semakin inklusif.

Program multilayanan multifungsi di setiap UPT menuntut kesiapan sumber daya khususnya Sumber Daya Manusia. Pekerja Sosial di setiap UPT yang memiliki kompetensi sebagai Pekerja Sosial Generalis diharapkan mampu memahami dan menjalankan program multilayanan dengan baik dan efektif serta responsif. Hal tersebut mengharuskan pekerja sosial memiliki kompetensi yang memadai dan mumpuni dalam memberikan layanan kepada seluruh jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pekerjaan sosial menurut Zastrow (2014 :40) adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan bagi tujuan mereka. Pekerja sosial adalah lulusan program pekerjaan sosial yang terakreditasi (oleh Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial), yang memiliki gelar sarjana atau magister.

Pekerja sosial menurut Morales & Sheafor (1983: 18-19) adalah seorang generalis dan harus siap bekerja diberbagai tingkatan (mikro, meso, dan makro). Pekerja sosial dapat bekerja dalam kapasitas melakukan pelayanan langsung membantu klien meningkatkan atau memperbaiki kemampuan berfungsi sosial mereka dan dalam kapasitas melakukan pelayanan tidak langsung untuk melakukan perubahan kondisi kemasyarakatan yang bisa mencegah atau memecahkan masalah yang mengganggu keberfungsian sosial.

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi (Undang-undang No. 14 Tahun 2019). Dalam Peraturan Menpan RB No. 1 Tahun 2014, pekerja sosial merupakan jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja sosial terdiri dari beberapa jenjang jabatan yaitu Pekerja Sosial Ahli Pertama, Pekerja Sosial Ahli Muda, Pekerja Sosial Ahli Madya dan Pekerja Sosial Ahli Utama. Pekerja Sosial Ahli Pertama melaksanakan praktik pekerjaan sosial, Pekerja Sosial Ahli Muda

melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan supervisi praktik pekerjaan sosial, Pekerja Sosial Ahli Madya melaksanakan praktik pekerjaan sosial, supervisi, dan pengembangan praktik pekerjaan sosial dan Pekerja Sosial Ahli Utama melaksanakan praktik pekerjaan sosial, serta penyusunan rencana strategis nasional, roadmap, pengembangan, dan inovasi sosial. Data yang disajikan oleh Pusdiklatbangprogf. Jumlah Pekerja Sosial yang aktif ada sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 1.500 Orang, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian terdahulu yang berjudul "*Analysis of Social Work Competency Standards in Social Welfare Institutions in North Sumatra Province, Indonesia*" yang dipublikasikan dalam *Research Journal in Advanced Humanities* pada tahun 2024 oleh Husni Thamrin, Subhilhar, Heri Kusmanto, dan Hatta Ridho dari Universitas Sumatera Utara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, penting memastikan bahwa pekerja sosial memiliki standar kompetensi yang memadai. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi pekerja sosial melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Bachrun (2011: 18) Kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik dasar seperti pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (*know-how, skill, dan attitude*) yang harus dimiliki oleh seseorang dan tim untuk menyelesaikan tugas pekerjaan agar diperoleh hasil terbaik.

Menurut Zastrow (2014:3) terdapat sembilan Kompetensi inti Pekerja Sosial Generalis diantaranya adalah Menunjukkan Perilaku Etis dan Profesional, Melibatkan Keberagaman dan Perbedaan dalam Praktik, Memajukan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, Terlibat dalam Riset Berbasis Praktik dan Praktik Berbasis Riset, Terlibat dalam Praktik Kebijakan, Terlibat dengan Individu, Keluarga, Kelompok, Organisasi, dan Komunitas, Menilai Individu, Keluarga, Kelompok, Organisasi, dan Komunitas, Intervensi dengan Individu, Keluarga, Kelompok, Organisasi, dan Komunitas serta Mengevaluasi Praktik dengan Individu, Keluarga, Kelompok, Organisasi, dan Komunitas Evaluasi berkelanjutan.

Sejalan dengan Kebijakan Pendidikan dan Standar Akreditasi *Council on Social Work Education* (CSWE) tahun 2015. Definisi kompetensi tingkat generalis dan spesialis, dengan perilaku praktik tersemat dalam setiap kompetensi adalah dimensi praktik kerja sosial: pengetahuan, nilai, keterampilan, dan proses kognitif dan afektif. Definisi generalis dikembangkan oleh CSWE. Fakultas Sekolah Kerja Sosial Simmons mengembangkan definisi tingkat spesialis.

Hal ini pun terdapat dalam keputusan etis dengan menerapkan standar Kode Etik *National Association of Social Workers* (NASW), undang-undang dan peraturan yang relevan, model untuk pengambilan keputusan etis, perilaku etis dalam penelitian, dan kode etik tambahan yang sesuai dengan konteks. Begitupun dengan *National Social Work Competency Framework* (NSWCF)

yang telah mengidentifikasi kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pekerja sosial dalam Praktik Langsung. Sembilan kategori tersebut mencakup kemungkinan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pekerja sosial di semua bidang praktik kerja sosial dalam Praktik Langsung.

Di Indonesia sendiri kompetensi pekerja sosial dilakukan melalui Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS) yang bersifat independen. Permensos No 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan tenaga Kesejahteraan Sosial, Uji Kompetensi adalah penilaian kualifikasi dalam praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan melalui pemberian sertifikat langsung, pelatihan sertifikasi, pendidikan profesi, dan/atau penilaian langsung. Sertifikasi dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam praktik pekerjaan sosial berdasarkan standar profesi Pekerja Sosial dan TKS sesuai keahlian yang dibutuhkan dalam praktik pekerjaan sosial. Sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial menjadi penting, sebagai upaya melakukan standarisasi kualitas kelayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih mengedepankan kualitas pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang berkualitas maka dipastikan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat dapat diminimalisir dengan kinerja SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang tersebar di lembaga-lembaga pelayanan baik milik pemerintah maupun milik swasta/masyarakat.

Program multilayanan di Sentra Wyata Guna meliputi berbagai jenis intervensi sosial, seperti pemberdayaan komunitas, layanan rehabilitasi, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Untuk melaksanakan program ini dengan baik, pekerja sosial membutuhkan pelatihan yang sesuai, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Pelatihan menjadi salah satu cara strategis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pekerja sosial sehingga mereka mampu merespons kebutuhan klien secara komprehensif.

Keberhasilan implementasi program multilayanan sangat bergantung pada kompetensi pekerja sosial yang terlibat di dalamnya. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan pekerja sosial dalam melakukan asesmen, merancang intervensi, memberikan layanan, serta melakukan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Namun, tantangan di lapangan sering kali muncul, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas permasalahan klien, hingga kemampuan pekerja sosial dalam berkolaborasi dengan pihak-pihak lain.

Sentra Wyata Guna sebagai pelaksana program multilayanan tentunya perlu beradaptasi dengan perubahan pada program serta dinamika kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pekerja sosial di Sentra Wyata Guna memiliki struktur organisasi segitiga terbalik. Jumlah pekerja sosial tingkat Ahli Madya lebih banyak dibandingkan dengan Pekerja Sosial pada tingkat dibawahnya muda, pertama terutama pekerja sosial terampil pelaksana. Sehingga pembagian tugas dan fungsi terhadap multilayanan tidak optimal.

Konteks ini menjadi relevan untuk diteliti karena belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti hubungan antara kompetensi pekerja sosial dan efektivitas implementasi program multilayanan di Sentra Wyata Guna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kompetensi pekerja sosial dan dampaknya terhadap keberhasilan program multilayanan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan praktik kerja sosial, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sosial yang berbasis kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi masukan bagi Sentra Wyata Guna dalam meningkatkan kompetensi pekerja sosialnya.

1.2 Perumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan adalah ”Bagaimana Kompetensi Pekerja Sosial dalam implementasi program multilayanan di Sentra Wyata Guna Bandung” selanjutnya, rumusan masalah difokuskan pada

1. Bagaimana karakteristik pekerja sosial di Sentra Wyata Guna Bandung?
2. Bagaimana pengetahuan pekerja sosial dalam pelaksanaan program multilayanan di Sentra Wyata Guna Bandung?

3. Bagaimana keterampilan pekerja sosial dalam memahami dan menerapkan kompetensi yang dibutuhkan dalam program multilayanan di Sentra Wyata Guna Bandung?

4. Bagaimana penerapan kode etik pekerja sosial dalam program multilayanan di Sentra Wyata Guna Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran jelas mengenai:

1. Mendeskripsikan karakteristik pekerja sosial di Sentra Wyata Guna Bandung.
2. Mendeskripsikan pengetahuan pekerja sosial dalam pelaksanaan program multilayanan di Sentra Wyata Guna Bandung.
3. Mendeskripsikan keterampilan pekerja sosial dalam memahami dan menerapkan kompetensi yang dibutuhkan dalam program multilayanan di Sentra Wyata Guna Bandung.
4. Mendeskripsikan penerapan kode etik pekerja sosial dalam program multilayanan di Sentra Wyata Guna Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai penjabaran dari latar belakang masalah dan tujuan oleh peneliti diatas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap kompetensi pekerja sosial, khususnya pada konteks Implementasi Program di Sentra Wyata Guna Bandung. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan wawasan yang lebih baik dalam mengembangkan teori terkait kompetensi pekerja sosial dan relevan untuk layanan di Sentra Wyata Guna Bandung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya pada Sentra Wyata Guna Bandung agar dapat meningkatkan pelayanan dan dukungan yang diberikan kepada pemerlu pelayana kesejahteraan sosial dan dapat lebih efektif dalam memberikan layanan yang mendukung program multilayanan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN , berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian

- BAB III : METODE PENELITIAN, berisi langkah dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan penelitian.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.
- BAB V : USULAN PROGRAM, memuat tentang berisi dasar pemikiran, nama, tujuan, sasaran, sistem partisipan dan pengorganisasian, metode dan teknik, langkah-langkah, rencana anggaran biaya, rencana evaluasi, analisis kelayakan serta indikator keberhasilan program.
- BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan penelitian mengenai kompetensi pekerja sosial dalam Implementasi Program Multilayanan di Sentra Wyata Guna Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN